

# Implementasi Program Bank Sampah (Studi Kasus di Kelurahan Cokrodiningratan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta)

Panitra Yulianto<sup>1</sup>, Sri Utami<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta,  
Indonesia

\*Corresponding author: nitpanetra@gmail.com

## RIWAYAT ARTIKEL

Diterima [01 July 2025]  
Revisi [09 August 2025]  
Diterima Untuk  
Publikasi [26  
September 2025]  
Dipublikasikan [29  
September 2025]

## KATA KUNCI

Implementasi; Program;  
Pengelolaan; Sampah

## KEYWORDS

Implementation; Program;  
Management; Waste

This work is licensed  
under a:



## ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengelolaan sampah melalui program bank sampah, yaitu sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mendorong pemilahan, pengumpulan, dan pemanfaatan sampah bernilai ekonomis. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus yang mengdeskripsikan peran bank sampah dalam mengurangi timbunan sampah yang diangkut ke TPA, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, dan memberikan nilai insentif ekonomi di Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian implementasi program bank sampah di Kelurahan Cokrodiningratan cukup baik meskipun masih terdapat berbagai hambatan. Hambatan itu berasal dari dalam bank sampah seperti kekurangan tenaga kerja, modal, keterbatasan waktu, ide, administrasi, dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Hambatan dari luar organisasi seperti rendahnya minat masyarakat untuk menabung sampah, terbatasnya dukungan dari pihak pemerintah dan swasta, serta ketidakpastian harga jual sampah dari pembeli sampah.

## ABSTRACT

This study discusses waste management through a waste bank program, which is a community-based waste management system that encourages the sorting, collection, and utilization of economically valuable waste. This research was conducted through a case study describing the role of waste banks in reducing waste accumulation, increasing public awareness of waste management, and providing economic incentives in Cokrodiningratan Village, Jetis District, Yogyakarta City. This research used a qualitative approach with descriptive methods, and data was collected through observation, interviews, and documentation. The results of the research on the implementation of the waste bank program in Cokrodiningratan Village were quite good, although there were still various problems. Internal problems at the waste bank include a lack of manpower, capital, time constraints, ideas, and administration, as well as a lack of Standard Operating Procedures (SOPs). External problems include low public interest in saving waste, limited support from the government and private sector, and uncertain waste prices from buyers.

## Pendahuluan

Masalah sampah telah menjadi persoalan besar yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan kondisi lingkungan. Budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi tantangan utama. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilah sampah sejak dari sumbernya menunjukkan bahwa aspek edukasi dan pembentukan perilaku belum sepenuhnya berhasil. Banyak masyarakat yang masih memandang sampah sebagai sesuatu yang langsung dibuang tanpa tanggung jawab lanjutan.

Timbulan sampah dapat mengakibatkan penumpukan di tempat pembuangan akhir, mencemari lingkungan dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 27.278.114 ton (SIPSN,2025), namun pengelolaan sampah di Indonesia belum optimal. Hal ini karena dari total sampah yang dihasilkan, hanya sekitar 13,95% yang berhasil dikelola dengan baik melalui daur ulang atau pengurangan sampah, sementara sekitar 47,7% sampah tidak dikelola dengan baik dan mencemari lingkungan (SIPSN,2025).

Salah satu upaya pengelolaan sampah berkelanjutan adalah program bank sampah yang tersebar dari tingkat desa atau kelurahan (Firdausi,2024). Pelaksanaan program harus didukung kebijakan, prosedur, dan sumber daya. Hal ini dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Kogoya et al.,2021). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Domestik Skala Nasional, sampah harus dikurangi dari sumbernya. Sumber terbesar sampah berasal dari rumah tangga, oleh karena itu Pengelolaan sampah rumah tangga diatur dalam PP No.81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, mendorong penerapan prinsip pengurangan sampah melalui *Reduce, Reuse, Recycle* (3R). Unsur penting yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan program yaitu adanya kelompok sasaran masyarakat yang menjadi sasaran program (Taufik,2020). Oleh karena itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 (Permen LHK No.14/2021) tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah hadir sebagai implementasi konkret dari pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Menurut Permen LHK No.14/2021, bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Permasalahan sampah yang terjadi di tingkat nasional juga tercermin di tingkat provinsi, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional seperti TPA Piyungan yang melayani beberapa kabupaten dan kota di DIY mengalami kelebihan kapasitas sehingga sering ditutup akibat *overload*. Hal ini berimbas pada Kota Yogyakarta memiliki tantangan besar dalam hal pengelolaan sampah. Sampah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan cukup signifikan. Volume sampah tahun 2023 sebesar 109.704 ton menjadi 121.356 ton pada tahun 2024, dengan sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga (SIPSN,2025). Komposisi sampah di Kota Yogyakarta didominasi oleh sisa plastik dan kertas/logam sebesar 48,45%, sisa makanan sebesar 46,45%, serta sisanya jenis lain (SIPSN,2025). Fenomena ini menunjukkan adanya perilaku konsumtif yang tinggi oleh masyarakat, namun pengelolaan sampah dari sumbernya masih rendah.

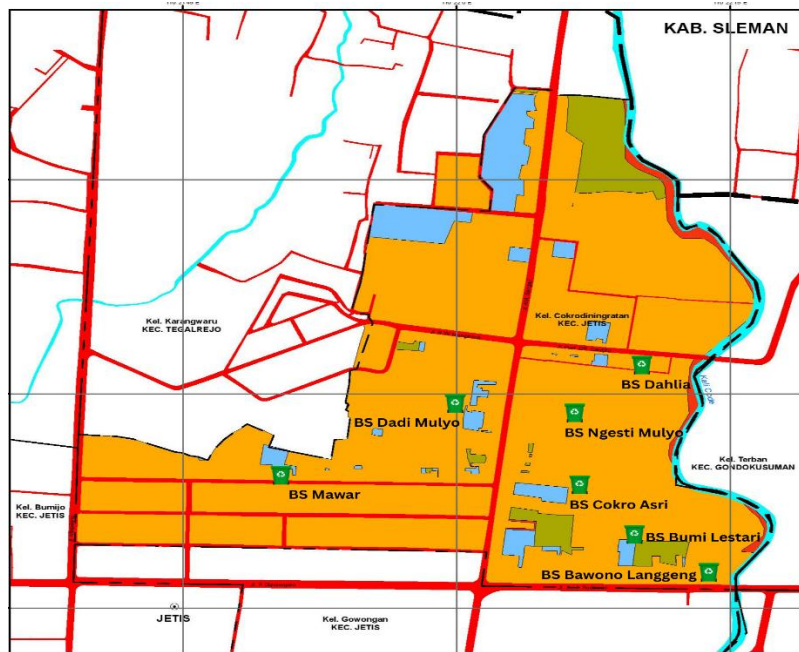
Kehadiran bank sampah memberikan manfaat, bukan hanya manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat lingkungan dengan menciptakan lingkungan yang bersih, tertata, dan nyaman (Rini et al.,2021). Hal ini telah dirasakan manfaatnya di wilayah Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta. Kelurahan ini juga membuktikan sebagai keluaran yang konsisten mendapatkan penghargaan program bank sampah di tingkat Kota Yogyakarta dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sejak tahun 2022.

**Tabel 1. Prestasi Kelurahan Cokrodingratan**

Bank Sampah	Penghargaan	Tahun
Bumi Lestari	Juara 1 Tingkat Kota kategori Bank Sampah Pembina	2022
Bumi Lestari	Juara 1 Tingkat Kota kategori Bank Sampah Legend	2022
Bumi Lestari	Juara 1 Tingkat Kota kategori Bank Sampah Pengolah Organik	2023
Dadi Mulyo	Juara 1 Tingkat Kota kategori Bank Sampah Inovatif	2023
Dadi Mulyo	Juara 1 Tingkat Kota kategori Bank Sampah Reduksi Sampah Anorganik	2023
Dadi Mulyo	Juara 2 Tingkat Kota kategori Bank Sampah Pembina	2024

Sumber : Kantor Kelurahan Cokrodingratan dan diolah peneliti

Alasan di lakukannya penelitian di Kelurahan Cokrodingratan karena kelurahan ini menjadi kelurahan yang paling sering berprestasi mengenai program bank sampah pada tingkat kota namun masih memiliki permasalahan sampah. Kelurahan Cokrodingratan memiliki 11 RW yang masing-masing telah memiliki bank sampah. Peneliti mengambil 7 sampel bank sampah, yaitu Bank Sampah Bumi Lestari (RW 10), Bank Sampah Dadi Mulyo (RW 03), Bank Sampah Bawono Langgeng (RW 11), Bank Sampah Cokro Asri (RW 09), dan Bank Sampah Dahlia (RW 07), Bank Sampah Mawar (RW 01), dan Bank Sampah Ngesti Mulyo (RW 08). Alasan pemilihan sampel ini didasarkan pada kategori bank sampah yang aktif sekaligus pernah menjadi juara tingkat kota dan bank sampah yang kurang aktif/tidak produktif.



**Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Bank Sampah di Kelurahan Cokrodingratan**

Sumber: Kantor Kelurahan Cokrodingratan dan diolah peneliti, 2025

Keberadaan bank sampah di Kelurahan Cokrodingratan tidak serta merta tanpa permasalahan. Permasalahan pertama, tidak semua bank sampah aktif secara produktif dalam mengelola sampah. Hal ini karena kekurangan jumlah nasabah masih sedikit atau tidakimbang dengan jumlah kartu keluarga setiap RW. Permasalahan kedua rendahnya minat masyarakat untuk menabung sampah di bank sampah. Meskipun bank sampah memberikan manfaat ekonomi tetapi minat masyarakat untuk menabung sampah bank sampah masih rendah. Permasalahan ketiga, pengurus bank sampah yang belum mampu mendorong warga setempat untuk aktif ikut menabung sampah. Hal ini karena adanya faktor

kepemimpinan sangat mempengaruhi aktif dan tidaknya bank sampah. Permasalahan keempat, pencatatan administrasi di bank sampah masih dilakukan secara manual dan sederhana. Hal ini menyebabkan keterbatasan informasi dan transparansi kepada nasabah. Permasalahan kelima adalah dukungan dari pemerintah terhadap keberadaan bank sampah dirasa belum optimal. Dukungan pemerintah terhadap bank sampah dinilai belum optimal karena selama ini lebih bersifat moril, sementara bantuan dana atau material masih terbatas.

Urgensi dari penelitian ini terletak di realita implementasi program bank sampah apakah benar-benar mampu membantu menangani permasalahan sampah atau hanya sebagai formalitas. Sementara Kelurahan Cokrodiningratan yang memiliki prestasi pada program bank sampah tingkat kota, ditemukan masih banyak mengalami permasalahan. Hal ini menjadi gap antara realita dengan prestasi. Penelitian ini menjadi penting karena dapat mengungkap bagaimana implementasi program bank sampah ini dalam mengatasi persoalan sampah di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program bank sampah di Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta. Mengingat pada Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 pada Pasal 1 Ayat (6), bank sampah merupakan fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan model implementasi bank sampah yang lebih baik dan dapat diadopsi di wilayah lain. Hasil dari penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan pengelolaan sampah di Kelurahan Cokrodiningratan, tetapi juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, pengelola bank sampah, serta masyarakat luas dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan perhatian terhadap implementasi program bank sampah di Kelurahan Cokrodiningratan untuk mengevaluasi program bank sampah telah diimplementasikan dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini akan membantu untuk mengidentifikasi hambatan yang menghalangi program bank sampah di Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif lebih fokus pada proses daripada hasil yang diperoleh. Melalui pendekatan ini, peneliti diberi kesempatan untuk mengeksplorasi fenomena yang berlangsung di bank sampah Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif adalah memberikan gambaran secara luas tentang implementasi program bank sampah di Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah program bank sampah dianalisis dengan menggunakan indikator-indikator model implementasi Ripley dan Franklin. Teori Ripley dan Franklin memiliki pendekatan campuran yang berfokus pada upaya mengidentifikasi berbagai faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat lapangan dan pemerintah. Faktor keberhasilan implementasi kebijakan yaitu tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, kelancaran pelaksanaan tugas rutinitas, dan terwujudnya dampak yang dikehendaki (Septiana et al.,2022).

Dalam pengumpulan data, digunakan empat teknik utama yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi (Sugiyono,2023). Analisis data model Miles dan Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif

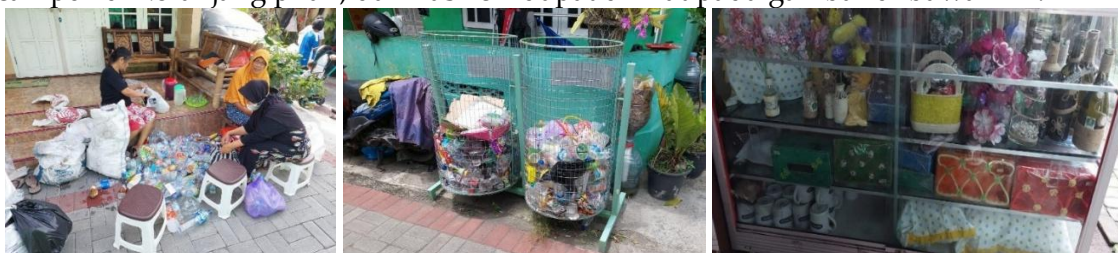
dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Sugiyono,2023).

## Hasil dan Pembahasan

### Tingkat Kepatuhan pada Ketentuan yang Berlaku

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan implementor terhadap isi kebijakan dan mandat yang telah ditetapkan (Septiana et al.,2022). Tingkat kepatuhan dalam penelitian ini dapat dilihat dari kepatuhan implementor terhadap Ketentuan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah yaitu kepatuhan implementor terhadap pengelolaan bank sampah, kepatuhan implementor terhadap fasilitas bank sampah, dan kepatuhan implementor terhadap tata kelola bank sampah.

Pertama, kepatuhan pengelolaan bank sampah sesuai Ketentuan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 yaitu dengan cara pengurangan berupa pemilahan sampah dan pengelolaan sampah sesuai prinsip 3R. Bank sampah di Kelurahan Cokrodiningratan dinilai cukup oleh peneliti. Hal ini karena kegiatan pengurangan sampah dan pengelolaan sampah belum semuanya merata. Peneliti masih menemukan praktik pemilahan yang kurang maksimal yaitu masih tercampur sampah anorganik dengan sejenisnya seperti sampah kardus/kertas yang tercampur dengan sampah plastik. Selain itu, masih ditemukannya sampah kering dalam kondisi basah seperti botol plastik yang masih berisi minyak/air/susu/sisa minuman lain. Hal ini menyebabkan bau tak sedap, kuman, dan risiko penyakit saat pengurus melakukan pemilahan sampah dari nasabah. Pada pengelolaan sampah oleh bank sampah, sebagian besar bank sampah masih terkendala dalam melakukan kegiatan 3R karena terkendala biaya atau modal untuk keperluan hiasan, minimnya tenaga kerja, dan terbatasnya waktu luang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan tersebut. Kegiatan pengelolaan bank sampah sebagian besar dilakukan sebatas kumpul, angkut, dan jual. Sebagian kecil bank sampah yang telah aktif dan produktif mampu melaksanakan kegiatan 3R dengan baik seperti Bank Sampah Dadi Mulyo. Kegiatan 3R dapat terlaksana dengan baik karena bank sampah ini memiliki pengurus yang aktif, rutin melakukan penimbangan, memiliki nasabah banyak, dan memiliki bangunan fisik atau tempat penyimpanan yang cukup layak meskipun hanya meminjam. Dokumentasi kegiatan pemilahan, sampah anorganik yang masih tercampur di keranjang pilah, dan hasil 3R dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2. Kegiatan pemilahan dan hasil kegiatan 3R**

*Sumber: Dokumentasi peneliti, 2025*

Kedua, kepatuhan implementor terhadap fasilitas bank sampah. Fasilitas bank sampah sekurang-kurangnya menurut Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 yaitu memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah yang dilengkapi label, kapasitas

pengelolaan sampah sesuai kebutuhan, lokasi mudah diakses, dan tidak mencemari lingkungan. Peneliti menilai cukup baik terhadap kepatuhan implementor terhadap fasilitas bank sampah. Hal ini dapat diketahui dari fasilitas perlengkapan sarana telah mencukupi dan sesuai kebutuhan, lokasi bank sampah yang strategis, dan tidak mencemari lingkungan. Namun, masih terdapat kendala terhadap bangunan fisik untuk menunjang kegiatan bank sampah agar lebih optimal. Semua bank sampah di Kelurahan Cokrodiningratan tidak memiliki kantor atau gudang pribadi. Seluruh kegiatannya dilakukan dengan meminjam tempat publik seperti di tepi jalan, pos ronda, kantor RW, bahkan rumah warga. Keterbatasan ini mempengaruhi bank sampah dalam melakukan pengelolaan sampah. Sebagian besar bank sampah hanya sebatas kumpul, angkut, jual dan tidak mengelolanya lebih lanjut. Hal ini dikarenakan tidak memiliki tempat penyimpanan dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan 3R secara optimal.

Ketiga, Kepatuhan implementor terhadap tata kelola bank sampah. Kepatuhan implementor terhadap tata kelola sampah sesuai dengan Ketentuan Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 mencakup komponen-komponen seperti memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan, dibentuk oleh kelurahan atau kepala desa, pelayanan bank sampah mencakup RT, RW, kelurahan atau desa, memiliki nasabah dan memiliki SOP. Dalam hal ini peneliti menilai baik. Hal ini ditandai dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari pihak kelurahan sebagai bentuk legitimasi, adanya struktur kelembagaan yang jelas, dibentuk oleh kelurahan, pelayanan bank sampah mencakup level RT/RW dan memiliki nasabah serta pemilihan pengurus yang melibatkan masyarakat. Kelemahan dalam tata kelola bank sampah masih terlihat dalam aspek SOP. Bank sampah belum memiliki SOP tertulis, sehingga pengelolaan bank sampah didasarkan pada kesepakatan dan tanggung jawab bersama. Berikut adalah contoh nomor SK terbaru yang dapat peneliti peroleh sebagai bukti legitimasi dan dukungan pemerintah terhadap pendirian bank sampah:

No	Nama Bank Sampah	No. Surat Keputusan (SK)
1	Dadi Mulyo	003/KEPCKD/IV/2023
2	Bawono Langgeng	011/KEPCKD/III/2023
3	Cokro Asri	009/KEPCKD/IV/2023
4	Mawar	002/KEPCKDP/V/2023
5	Sido Dadi	001/KEPCKDP/IV/2023
6	Rogro Green	005/KEPCKPD/X/2023
7	Dahlia	003/KEPCKPD/V/2023
8	Arto Moro	006/KEPCKPD/III/2023
9	Guyup Rukun	006/KEPCKPD/IV/2023
10	Bumi Lestari	010/KEPCKPD/IV/2022

**Tabel 2. Daftar SK Bank Sampah Cokrodiningratan**

*Sumber: Kantor Kelurahan Cokrodiningratan dan diolah peneliti, 2025*

### **Kelancaran Pelaksanaan Tugas Rutinas**

Setiap implementor harus memastikan bahwa tugas dan fungsi yang dijalankan berjalan lancar, sehingga dapat meminimalkan potensi masalah yang muncul. Ketika tugas pokok dan fungsi berjalan tanpa kendala, pelaksanaan kebijakan cenderung berjalan dengan baik, meningkatkan peluang keberhasilan implementasi secara keseluruhan (Septiana et al.,2022). Kelancaran pelaksanaan tugas rutinitas dapat dikatakan berhasil atau tidak, dapat diketahui berdasarkan hasil analisis kelancaran ketersediaan sumber daya bank sampah berupa dana,

tenaga kerja, dan sarana, kelancaran proses sosialisasi bank sampah, dan kelancaran pelayanan bank sampah.

Pertama, kelancaran ketersediaan sumber daya (dana, tenaga kerja, sarana). Sumber dana bank sampah berasal dari pendapatan hasil pemilahan sampah dan dibantu dana swadaya oleh para pengurus bank sampah. Jika bank sampah memiliki jumlah nasabah dan setoran sampah yang banyak, pendapatan para nasabah ikut meningkat. Bantuan operasional bank sampah oleh pemerintah yang terbaru berupa buku besar untuk pencatatan administrasi dan keranjang pilah. Dari pihak swasta belum pernah memberikan bantuan kepada bank sampah melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sumber daya tenaga kerja bank sampah tergolong mencukupi bagi bank sampah yang aktif, namun masih ditemukan bank sampah yang kekurangan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bank sampah yang aktif mampu mendorong masyarakat untuk peduli terhadap sampah dan bergabung menjadi pengurus bank sampah. Sementara itu, bank sampah yang tidak produktif memiliki jumlah nasabah yang sangat sedikit dan masih membutuhkan tenaga kerja. Ketersediaan sumber daya selanjutnya adalah sarana bank sampah. Sarana bank sampah erat kaitannya dengan sumber dana. Jika memiliki sumber daya dana yang lancar, sarana dan prasarana bank sampah akan terpenuhi. Hambatan yang terjadi saat memenuhi ketersediaan sumber daya sarana adalah minimnya dana yang diperoleh bank sampah. Dana diperoleh dari hasil pemilahan sampah. Bank sampah yang memiliki jumlah nasabah yang banyak dapat memenuhi kebutuhan sarana melalui hasil pemilahan. Bank sampah yang memiliki jumlah nasabah yang sedikit, akan mengambil dana pribadi atau swadaya untuk menutup biaya operasional. Hal ini mencerminkan keterbatasan dukungan dana dari pihak luar sekaligus semangat kemandirian dari pihak internal bank sampah.

Kedua, kelancaran proses sosialisasi bank sampah. Kelancaran proses sosialisasi bank sampah sudah baik meskipun hasilnya masih terbatas. Hal ini ditandai dengan sosialisasi dilaksanakan secara rutin dan intensif baik dari Forum Bank Sampah (FBS) Kelurahan Cokrodiningratan, pengurus bank sampah dan nasabah bank sampah. Kelancaran sosialisasi masih menghadapi tantangan terutama dari sisi respons masyarakat yang cenderung pasif karena sulitnya mengubah budaya pengelolaan sampah. Namun, proses sosialisasi terus dilakukan rutin melalui pertemuan langsung seperti pertemuan kampung, rapat RT/RW, perkumpulan PKK. Apabila tidak dapat bertemu langsung, sosialisasi dilakukan melalui jejaring sosial WhatsApp dan Instagram.

Ketiga, kelancaran pelayanan bank sampah. Kelancaran pelayanan bank sampah di Kelurahan Cokrodiningratan seperti pelayanan pengumpulan, penimbangan, pemilahan, dan pencatatan dinilai cukup baik oleh peneliti, tetapi masih menemui hambatan. Hambatan yang pertama adalah beberapa bank sampah tidak memiliki kepastian waktu operasional. Hal ini karena bank sampah tidak memiliki kantor pribadi atau hanya pinjam tempat fasilitas publik. Apabila tempat yang akan digunakan sedang dipakai kegiatan lain, waktu buka bank sampah akan diganti. Hambatan kedua yaitu bank sampah dapat batal penimbangan karena pelapak terkadang tidak jadi datang untuk membeli sampah. Apabila pengepul tidak jadi datang, kegiatan bank sampah akan ditunda. Selain itu, harga sampah dari pelapak selalu berubah-ubah sehingga tidak dapat dipastikan secara langsung. Hal ini berimbas pada lamanya proses administrasi bank sampah karena harus menunggu kepastian harga dari pelapak untuk dihitung ke tabungan nasabah. Hambatan ketiga adalah pencatatan administrasi yang manual. Hal ini terjadi karena pengurus bank sampah belum menemukan sistem administrasi bank sampah yang sesuai dengan kebutuhan pengurus bank sampah.

Proses administrasi di bank sampah cenderung panjang dan bertahap untuk mendapatkan hasil akhir yaitu jumlah tabungan untuk dilaporkan ke nasabah dan jumlah sampah yang terkelola untuk dilaporkan ke DLH Kota Yogyakarta. Hasil catatan tabungan nasabah memiliki kekurangan yaitu tidak informatif seperti tidak dimuatnya jumlah sampah per jenis yang telah disetor dan harga yang laku terjual oleh pengepul. Akibatnya nasabah tidak mengetahui jika pendapatannya selalu berubah-ubah karena harga sampah dari pengepul fluktuatif. Catatan jumlah sampah terkelola memiliki proses yang cukup panjang karena diproses secara manual dan harus membedakan jenis sampah anorganik seperti membedakan jenis kertas, jenis plastik, jenis logam, jenis kaca, atau jenis lainnya. Proses pelayanan bank sampah dapat dilihat dari beberapa gambar berikut:



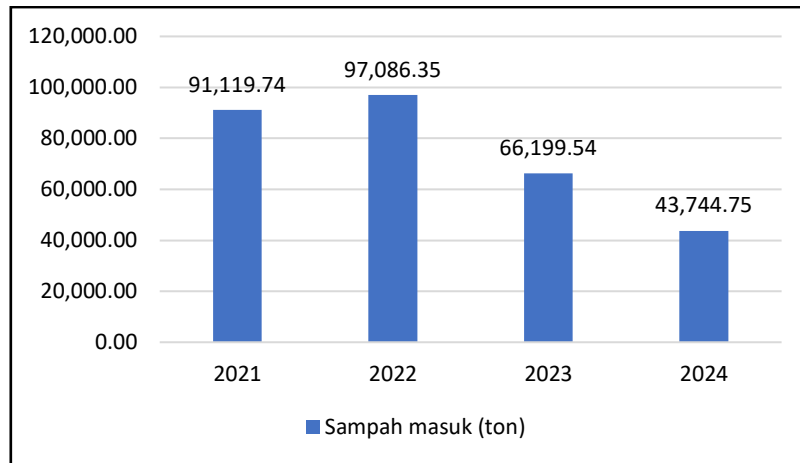
**Gambar 3. Proses pelayanan bank sampah dari pengumpulan, penimbangan, pemilahan, dan pencatatan.**

*Sumber: Dokumentasi peneliti, 2025*

### **Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki**

Kepatuhan dan kelancaran pelaksanaan tugas rutinitas yang dijalankan dalam melakukan implementasi program bank sampah dapat berjalan dengan baik, akan terwujud dampak yang dikehendaki sesuai dengan tujuan adanya implementasi program bank sampah (Septiana et al., 2022). Tujuan program bank sampah adalah berkurangnya jumlah sampah yang dibuang ke TPA, meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat ke bank sampah, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki dapat dinilai dari ketiga tujuan bank sampah tersebut.

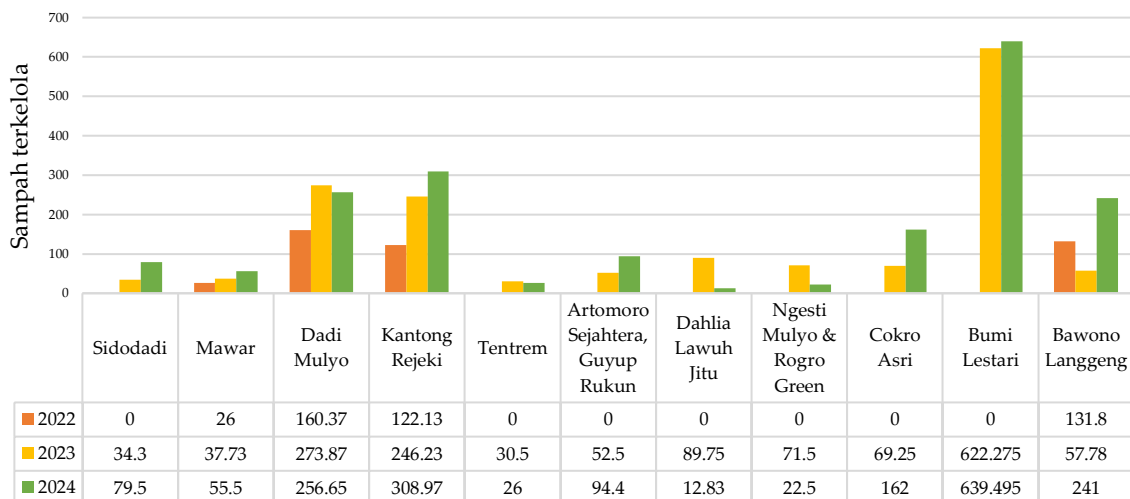
Pertama, berkurangnya jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Berkurangnya jumlah sampah yang dibuang ke TPA merupakan tujuan penting dari berdirinya bank sampah. Berkurangnya jumlah sampah yang dibuang ke TPA berdampak pada tekanan terhadap kapasitas TPA yang dapat dikurangi secara signifikan dan berkontribusi pada pengurangan pencemaran lingkungan. Pada tahun 2024 terjadi penutupan TPA Piyungan yang menyebabkan sampah yang dapat diangkut hanya sampah residu. Sampah residu yang dimaksud adalah sampah daun dan sampah diapers. Hal ini berarti masyarakat harus memilah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang. Program pemilahan sampah ini dapat dilakukan melalui program bank sampah yang berada di setiap RW/RT. Untuk mengetahui jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piyungan di Kota Yogyakarta, dapat dilihat dari gambar berikut:



**Gambar 4. Gambar Grafik Sampah Kota Yogyakarta yang Diangkut ke TPA Piyungan**

Sumber: [sipsn.menllh.go.id](https://sipsn.menllh.go.id), diakses pada 30 Mei 2025.

Berdasarkan di atas dapat dilihat bahwa adanya penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA Piyungan sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Penurunan ini dapat diartikan sebagai indikasi adanya upaya pengelolaan sampah yang lebih baik di tingkat kota, termasuk di dalamnya adalah peran bank sampah. Peran bank sampah dalam pengelolaan sampah memiliki pengaruh terhadap sampah yang dibuang ke TPA. Bank sampah mengelola sampah dengan cara memilah sampah dan mengelola sampah agar tidak dikirim ke TPA. Pengelolaan sampah pada bank sampah Kelurahan Cokrodingratan menunjukkan tren kenaikan, seperti pada grafik di bawah ini.



**Gambar 5. Gambar Grafik Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cokrodingratan**

Sumber: DLH Kota Yogyakarta dan diolah peneliti, 2025

Berdasarkan grafik pada gambar 4.43, rata-rata sampah yang terkelola oleh bank sampah di Kelurahan Cokrodingratan setiap tahunnya mengalami kenaikan hingga tahun 2024. Berdasarkan hasil dari kedua data pada gambar 4.42 dan 4.43 menunjukkan bahwa adanya hubungan antara penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA dengan meningkatnya jumlah sampah yang berhasil dikelola oleh bank sampah. Peran bank sampah

menjadi salah satu strategi efektif dalam mendukung upaya pengurangan beban sampah yang harus diproses di TPA.

Kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam bank sampah menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Sosialisasi tidaklah cukup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, namun perlu bukti nyata yaitu hadirnya bank sampah mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Strategi bank sampah yang dapat langsung diterapkan adalah pemberian *reward* atau penghargaan kepada nasabah dan mempersingkat periode pembagian hasil tabungan. Hal ini telah dilakukan oleh bank sampah di Kelurahan Cokrodiningratan seperti pemberian sembako kepada nasabah bank sampah, berwisata, mengunjungi TPS3R, tidak ada biaya administrasi yang dibebankan ke nasabah, dan periode bagi hasil tabungan yang dapat dipersingkat. Untuk memberikan gambaran jelas mengenai peningkatan jumlah nasabah di bank sampah Kelurahan Cokrodiningratan, berikut ini adalah data mengenai jumlah nasabah dari tahun 2022 hingga 2024 dan terbaru pada tahun Mei 2025:

**Tabel 3. Jumlah Nasabah Bank Sampah Kelurahan Cokrodiningratan**

RW	Nama Bank Sampah	2022	2023	2024	2025
1	Sidodadi	11	10	12	12
2	Mawar	15	0	7	15
3	Dadi Mulya	40	60	79	92
4	Kantong Rejeki	35	30	76	76
5	Tentrem 5	17	41	20	20
6	Guyup Rukun	0	30	30	30
6	Arto Moro	0	22	8	8
6	Sejahtera	15	15	27	27
7	Lawuh Jitu	25	26	25	25
7	Dahlia	0	0	14	15
8	Ngesti Mulyo	17	20	23	10
9	Cokro Asri	20	15	15	20
10	Bumi Lestari	189	212	221	221
11	Bawono Langgeng	35	19	62	70
	<b>Total</b>	<b>419</b>	<b>500</b>	<b>619</b>	<b>641</b>

Sumber: DLH Kota Yogyakarta dan diolah oleh peneliti, 2025.

Dapat diketahui dari tabel 4.21 bahwa adanya peningkatan jumlah nasabah setiap tahunnya. Mayoritas bank sampah mengalami kenaikan jumlah nasabah. Hal ini mencerminkan kesadaran masyarakat yang kian tumbuh, karena sampah yang disetor harus sudah dipilah, sehingga mendorong kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah.

Ketiga, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Bank sampah memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat termasuk pengurus bank sampah dengan cara mengubah sampah yang dianggap tidak berguna menjadi sumber penghasilan. Melalui bank sampah, masyarakat dapat menukarkan material sisa seperti botol plastik, kertas, karton, dan sampah anorganik lain yang memiliki nilai jual untuk ditabung, sehingga mendapatkan insentif ekonomi. Mayoritas nasabah bank sampah menilai, menjadi anggota bank sampah dapat menambah insentif ekonomi meskipun hanya sedikit. Hal ini dipengaruhi oleh banyak

sedikitnya jumlah sampah yang ditabung ke bank sampah, sehingga manfaat ekonomi yang dirasakan dapat berbeda-beda. Bagi nasabah yang sering menabung akan mendapatkan hasil yang cukup banyak. Jika jarang menabung, hasilnya belum dapat dirasakan. Tambahan insentif ekonomi juga dapat dirasakan oleh pengurus bank sampah meskipun tidak besar. Insentif ekonomi dipengaruhi oleh banyak sedikitnya sampah yang disetorkan oleh nasabah dan ketelitian pengurus dalam memilah sampah. Apabila sampah dari nasabah banyak terkumpul, hasil pemilahan akan lebih banyak dan penghasilan akan meningkat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian implementasi program bank sampah di Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, dapat diperoleh kesimpulan bahwa implementasi program bank sampah di Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta sudah berjalan cukup baik. Hal itu dapat diketahui dari tiga indikator dari teori Ripley dan Franklin yang digunakan untuk mengukur implementasi program bank sampah. Pada indikator tingkat kepatuhan yang berlaku, peneliti menilai cukup baik tetapi masih terdapat hambatan seperti kegiatan pengurangan dan penanganan sampah sudah berjalan tetapi masih ada hambatan yaitu pada keterbatasan tenaga kerja, waktu, ide dan modal. Fasilitas fisik bank sampah juga masih terbatas karena tidak memiliki bangunan permanen seperti gudang atau kantor sehingga kegiatannya masih meminjam tempat. Tata kelola bank sampah belum memiliki SOP yang jelas sehingga menjadi kelemahan yang perlu diperbaiki. Pada indikator kelancaran pelaksanaan tugas rutinitas, peneliti menilai cukup baik, tetapi masih ada hambatan terutama sumber daya dana yang terbatas dan minimnya bantuan dana dari pemerintah. Kegiatan bank sampah masih dapat berjalan meski penuh dengan keterbatasan. Sosialisasi bank sampah dilakukan tanpa adanya hambatan meskipun masyarakat kurang responsif. Kendala lain adalah proses pencatatan administrasi bank sampah yang masih konvensional atau belum adanya sistem pencatatan modern. Hal ini membuat pencatatan administrasi bank sampah terkesan rumit, panjang, dan kurang transparan. Pada indikator terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, peneliti menilai baik. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, bank sampah mampu mencapai tujuannya dengan baik yaitu mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA, meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan nilai insentif ekonomi. Hal ini menunjukkan apabila program bank sampah mendapatkan dukungan yang maksimal dari pemerintah dan masyarakat disertai ketekunan para pengurus bank sampah, maka bukan hal yang tidak mungkin jumlah penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA akan terus berkurang dan dapat meningkatkan insentif ekonomi.

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah pertama pemerintah kelurahan sebaiknya terus memberikan dukungan terhadap bank sampah, tidak hanya berupa dukungan moril, tetapi juga materiel, insentif, sponsor, promosi, serta bantuan alat-alat yang dibutuhkan. Kedua, pemerintah dapat memberikan pelatihan manajemen organisasi kepada pengurus bank sampah dan memberikan pelatihan serta sosialisasi rutin kepada pengurus bank sampah dan masyarakat untuk mengelola sampah. Ketiga, pihak Forum Bank Sampah (FBS) Kelurahan Cokrodiningratan melakukan pendampingan dan monitoring rutin terhadap bank sampah untuk memastikan bahwa bank sampah tetap aktif serta mampu mengatasi masalah dengan cepat. Keempat, dalam menunjuk kepengurusan bank sampah sebaiknya melibatkan tokoh masyarakat, seperti Ketua RW, Ketua RT, tetua kampung, dan pemuda-pemudi

kampung setempat, agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam program bank sampah. Kelima, pengurus bank sampah perlu membangun kedekatan dengan warga agar program bank sampah lebih mudah diterima dan mendorong partisipasi warga sebagai nasabah. Keenam, pengurus bank sampah perlu menyosialisasikan pengelolaan sampah efektif dengan tidak hanya memberi himbauan, tetapi juga menunjukkan bukti nyata keberhasilan pengelolaan sampah. Ketujuh, pengurus bank sampah dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta dalam upaya pengelolaan sampah, misalnya dengan mendorong perusahaan menjadi nasabah bank sampah. Kedelapan, pengurus bank sampah perlu menyusun SOP yang jelas dan tertulis, yang mencakup jadwal operasional, prosedur pelayanan, pencatatan administrasi, serta mekanisme pembagian hasil tabungan. Kesembilan, pengurus bank sampah perlu belajar menggunakan sistem pencatatan administrasi berbasis digital atau manual sistematis. Terakhir bagi masyarakat perlu membiasakan diri dalam mengelola sampah sejak dari tingkat keluarga, dengan cara mengajak anggota keluarga, khususnya anak-anak, untuk belajar memilah sampah dan menerapkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan sejak dini.

### Referensi

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Azwar, Saifuddin. (2014). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. (2023). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. (2022). *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Firdausi, E. (2024). Implementasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan : Studi Kasus Bank Sampah di Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Sains*, Vol 5, Hal 61-63. <https://journals.ecotas.org/index.php/ems/id/article/view/162>
- Hartati, Destriana, Novi Wijaya. (2022). *Buku Ajar Administrasi dan Manajemen Pembelajaran Penjaskes*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Askara.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah*. Jakarta.
- Kelurahan Cokrodiningratan. (2025). *Profil Kelurahan Cokrodiningratan*. <https://cokrodiningratankel.jogjakota.go.id/>
- Kogoya, M., Posumah, J. H., & Kolondam, H. (2021). Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan masyarakat di Desa Jirene Kecamatan Nogy Kabupaten Lanny-Jaya. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 7, 81-91. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/32084>
- Manila, I. (2006). *Praktek Manajemen Pemerintahan dalam Negeri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pramono, J. (2022). *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Surakarta: Unisri Press.
- Purwanto, Erwan Agus, Dyah Ratih Sulistyastuti. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Gava Media.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Domestik Skala Nasional*. Jakarta.

- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*. Jakarta.
- Rini, Yuliana, Marchell Sinay, Pedaman Halawa, Mita Sirait, Franz Sinaga, Khrisna Silalahi. (2021). *Modul Training of Trainer Bank Sampah*. Jakarta: Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Rohim, M. (2020). *Buku Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah*. Pasuruan: Qiara Media Partner.
- Septiana, A. R., Suprpto, Monica Feronica Bormasa, Amtai Alalsan, Ahmad Mustanir, Hilarius Wandan, Muhammad Rais Rahmat Razak, Polikarpus Lalamafu, Triono, Hinfia Mossahananza, Iwan Henri Kusnadi, Sunariyanto, Syamsu Rizal, Delila Anggelina Nahak. (2022). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). (2020). *Data Pengelolaan Sampah*. <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public/data/komposisi>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyorini, dkk. 2021. *Supervisi Pendidikan*. Riau: CV. DOTPLUS Publisher.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.
- Taufik, A., Usman, J., & Mahsyar, A. (2020). Implementasi program rakyat dalam pengembangan perajin perahu Pinisi Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 7, 5–6. <https://journal.unismuh.ac.id>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publising Service).